INTEGRASI ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HARTA BERSAMA DAN KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA

DISERTASI

Oleh:

RASYID RIZANI
NIM. 230311020027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026

INTEGRASI ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HARTA BERSAMA DAN KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA

DISERTASI

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Ilmu Syariah

Oleh:

RASYID RIZANI
NIM. 230311020027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RASYID RIZANI
NIM	: 230311020027
Tempat/Tanggal Lahir	: Wawai Gardu, 28 Juni 1985
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Syariah
Fakultas/Program	: S3 /Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul,

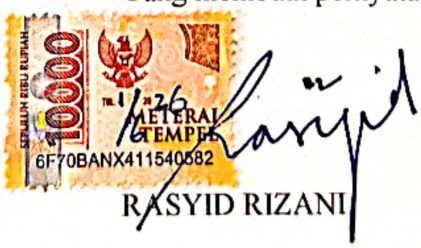
"INTEGRASI ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HARTA BERSAMA DAN KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA"

adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 1 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



RASYID RIZANI

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1518/Un.14/IV/UPM-BP/3/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat **https://www.turnitin.com**, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Rasyid Rizani
NIM	: 230311020027
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Integrasi Aspek Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama Dan Kewarisan di Pengadilan Agama.

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil **9% (kurang dari 20%)**. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERTUTUP.**

Banjarmasin, 30 Maret 2026

Wakil Direktur Pascasarjana

Dr. Wahyudin, M.Pd.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1558/Un.14/IV/UPM-BP/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat **https://www.turnitin.com**, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Rasyid Rizani
NIM	: 230311020027
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Integrasi Aspek Keadilan dalam Putusan Harta Bersama dan Kewarisan di Pengadilan Agama

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil **kurang dari 20%** Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA.**

Banjarmasin, 03 Juni 2026

Wakil Direktur Pascasarjana

Dr. Wahyudin, M.Pd.I.

Halaman Persetujuan

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nama: RASYID RIZANI
NIM. 230311020027

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum	Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Tanggal: 8 MEI 2026	Tanggal: 8 MEI 2026

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul **"Integrasi Aspek Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama dan Kewarisan di Pengadilan Agama"** ditulis oleh Rasyid Rizani, NIM. 230311020027 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2026

Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. (Penguji Utama)	2.
3. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. (Penguji)	3.
4. Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. (Penguji Eksternal)	4.
5. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Penguji)	5.
6. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Penguji)	6.
7. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. (Penguji/Sekretaris)	7.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, yang telah menganugerahkan akal, ilmu, dan kekuatan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ṢAW, utusan yang membawa risalah keadilan sebagai inti ajaran Islam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Disertasi yang berjudul "**Integrasi Aspek Keadilan dalam Putusan Harta Bersama dan Kewarisan di Pengadilan Agama"** ini lahir dari pergulatan intelektual yang panjang sekaligus dari pengalaman praktis penulis di medan peradilan. Selama bertahun-tahun bertugas sebagai hakim di lingkungan Pengadilan Agama, penulis menyaksikan betapa persoalan harta bersama dan kewarisan tidak sekadar bersentuhan dengan norma hukum yang tertulis, melainkan juga menyentuh nurani terdalam para pencari keadilan. Fakta itulah yang mendorong penulis untuk menggali lebih jauh: sejauh mana nilai keadilan substantif telah terintegrasi dalam putusan-putusan hakim, dan di mana celah yang masih menuntut pembenahan ilmiah serta yudisial.

Keadilan, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah, adalah jiwa syariat dan tujuan tertinggi hukum Islam. Namun, antara cita keadilan yang transendental dengan realitas putusan yang faktual, seringkali terdapat jarak yang memerlukan jembatan metodologis. Disertasi ini hadir sebagai salah satu upaya menjembatani kesenjangan tersebut, dengan mengintegrasikan perspektif fikih klasik, hukum positif nasional, dan teori keadilan kontemporer dalam satu bangunan analisis yang kohesif dan sistematis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan doktoral.
2. **Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.**, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh jajaran akademik dan administrasi yang telah memberikan pelayanan dan dukungan selama proses studi.
3. **Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah, dan **Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.**, selaku Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing dan mengawal proses akademik

penulis dengan penuh dedikasi. Secara khusus, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada **Siti Nur Syifa, S.H., M.H.,** sosok yang dengan ketulusan, kesabaran, dan pengabdiannya telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai urusan akademik selama masa studi.

4. **Promotor (Prof. Dr. H.M. Hanafiah., M.Hum) dan Co-Promotor (Prof. Dr. Hj. Wahidah., M.H.I)** atas bimbingan yang tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk cara pandang penulis dalam melihat hukum sebagai instrumen keadilan yang hidup.
5. **Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.,** selaku Penguji Eksternal, yang dengan ketajaman analisis, keluasan wawasan keilmuan, serta kepedulian akademiknya, di tengah kesibukan sebagai asisten Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan disertasi ini.
6. Segenap Guru Besar dan Dosen, yang telah mewariskan tradisi keilmuan yang kokoh dan semangat intelektual yang tak pernah padam.
7. Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, atas kepercayaan dan dukungan kelembagaan yang memberikan ruang bagi hakim untuk tumbuh tidak hanya sebagai praktisi, tetapi juga sebagai akademisi.
8. Seluruh Rekan Hakim di Pengadilan Agama, khususnya di lingkungan tempat penulis bertugas selama menempuh Pendidikan S3 ini (Pengadilan Agama Kuala Kurun, Banjarbaru, dan Rantau) atas inspirasi, diskusi yudisial, dan persaudaraan yang tulus.
9. Para Tuan Guru, Kyai, Ustaz, serta seluruh pendidik yang telah membimbing penulis sejak masa pendidikan dasar hingga saat ini.
10. Keluarga tercinta, alm. ayahanda, ibunda, adik-adik, serta kedua mertua penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Doa, kasih sayang, keteladanan, dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang kehidupan tidak akan pernah mampu terbalaskan dengan kata-kata. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir di sisi Allah Swt.
11. Secara khusus dan dengan rasa cinta yang tak terhingga, penulis mempersembahkan penghargaan terdalam kepada istri tercinta, **Rusmini**, yang senantiasa menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan pendamping setia dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, doa-doa yang tidak pernah putus, serta keyakinan yang selalu diberikan kepada penulis ketika semangat mulai melemah. Kepada keempat putri dan putra tercinta, **Auryn Safeera Rijany, Sonia Elvina Rijany, Kyra Queensha Rijany, dan Muhammad Rayyan Rasyid**, terima kasih karena telah menjadi cahaya kebahagiaan dengan penuh kesabaran, pengertian, dan doa yang tak putus-putusnya menjadi

tiang penopang di setiap momen paling berat dalam perjalanan studi ini. Kalian adalah alasan paling jujur mengapa penulis terus berjalan.

12. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan dalam Program Doktor Ilmu Syariah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Secara khusus kepada **Dr. Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag** dan **Dr. Gusti Muhammad Sadiq**, **S.Fil.I., M.H.,** yang senantiasa hadir memberikan semangat, dukungan, dan penguatan dalam berbagai situasi. Persahabatan yang terjalin selama proses akademik ini merupakan anugerah yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa karya ini, seperti setiap ikhtiar manusiawi, tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Kritik yang konstruktif serta masukan yang tulus dari para pembaca, sejawat akademisi, dan praktisi hukum akan diterima dengan lapang dada, sebab kebenaran ilmiah hanya tumbuh subur di atas tanah dialog yang jujur.

Akhirnya, penulis menaruh harapan bahwa disertasi ini tidak hanya memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia, tetapi juga menjadi bekal reflektif bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dengan lebih berkeadilan, berkemanusiaan, dan berketuhanan. Semoga Allah Swt meridai setiap langkah ikhtiar ini dan menjadikannya amal ilmu yang bermanfaat, *ilmun yuntafa'u bihi*.

Banjarmasin, 1 Juni 2026

Penulis

RASYID RIZANI

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1	ا	=	A	11	ز	=	Z	21	ق	=	Q
2	ب	=	B	12	س	=	S	22	ك	=	K
3	ت	=	T	13	ش	=	Sy	23	ل	=	L
4	ث	=	TS	14	ص	=	Sh	24	م	=	M
5	ج	=	J	15	ض	=	Dh	25	ن	=	N
6	ح	=	H	16	ط	=	Th	26	و	=	W
7	خ	=	Kh	17	ظ	=	Zh	27	ه	=	H
8	د	=	D	18	ع	=	‘	28	ء	=	`
9	ذ	=	Dz	19	غ	=	Gh	29	ي	=	Y
10	ر	=	R	20	ف	=	F			=	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الديوان) al-dîwân bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	ai	a dan i
ـَو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ الله	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاع	hub al-istithlâ’
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِن الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Rasyid Rizani, NIM. 230311020027, *Integrasi Aspek Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama dan Kewarisan di Pengadilan Agama,* Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, dan Pembimbing II Prof. Dr. Hj. Wahidah., M.H.I., Disertasi, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: Keadilan moral; keadilan hukum; keadilan sosial; harta bersama; kewarisan Islam; ijtihad hakim; hukum progresif; hukum sebagai alat rekayasa sosial; Pengadilan Agama Indonesia.

Penelitian ini menganalisis integrasi konsep keadilan moral, hukum, dan sosial dalam putusan perkara harta bersama serta kewarisan di Pengadilan Agama Indonesia. Fokus utama kajian terletak pada dilema hakim dalam menyelaraskan kepastian hukum normatif dengan tuntutan keadilan substantif yang berkembang di masyarakat. Problematika ini muncul ketika penerapan aturan baku, seperti pembagian harta bersama secara rata atau pembatasan hak waris bagi non-Muslim, dianggap belum memenuhi rasa keadilan moral dan sosial dalam kasus-kasus spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya terobosan hukum, seperti pemberian wasiat wajibah melalui putusan hakim semakin dikembangkan. Tulisan juga menawarkan sebuah rumusan matematika sederhana tentang cara menghitung porsi keadilan berimbang dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Secara teoritik, penelitian ini mengintegrasikan pandangan keadilan dari perspektif filsafat Barat dan Islam, mencakup teori keadilan klasik Plato dan Aristoteles yang menitikberatkan pada harmoni dan proporsionalitas, teori keadilan sosial John Rawls yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan distributif, serta pemikiran Al-Farabi dan Al-Ghazali yang memandang keadilan sebagai keseimbangan antara moralitas individu dan kemaslahatan sosial. Ketiga dimensi keadilan tersebut dioperasionalisasikan dalam kerangka teori berlapis: *Grand Theory* berupa teori Negara Hukum yang meliputi teori kewenangan dan perlindungan hukum; *Middle Range Theory* meliputi teori hak dan kewajiban; serta *Applied Theory* berupa teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, dan kasus (kasus konkret putusan Pengadilan Agama). Analisis data menitikberatkan pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum positif dalam konteks keadilan substantif melalui ijtihad dan metode penemuan hukum yang responsif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, integrasi tiga aspek keadilan sering kali menuntut fleksibilitas interpretasi hukum, bahkan membuka ruang bagi putusan *contra legem* apabila norma positif dipandang tidak mencerminkan nilai keadilan substantif. Hakim berperan sebagai moral agent sekaligus *social engineer* yang berfungsi menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya mengharmonisasikan keadilan moral, hukum, dan sosial merupakan esensi dari ijtihad hakim dalam mewujudkan keadilan hukum Islam yang komprehensif dan kontekstual di Indonesia.

ABSTRACT

Rasyid Rizani, Student ID: 230311020027, *The Integration of Justice Aspects in Marital Property and Inheritance Judgments at the Religious Courts*, Supervisor I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, and Supervisor II: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., Dissertation, Graduate School of UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Keywords: Moral justice; legal justice; social justice; joint marital property; Islamic inheritance; judicial ijtihad; progressive law; law as a tool of social engineering; Indonesian Religious Courts.

This research analyzes the integration of moral, legal, and social justice concepts within court decisions concerning marital assets and inheritance at the Indonesian Religious Courts. The study focuses on the judicial dilemma of aligning normative legal certainty with the demands of substantive justice evolving within society. This problematic gap arises when the application of standard regulations—such as the equal division of marital property or the exclusion of non-Muslim heirs—is deemed insufficient in satisfying moral and social justice in specific cases. Consequently, this study emphasizes the importance of legal breakthroughs, such as the expanded application of *wasiat wajibah* (mandatory legacy) through judicial discretion. The paper also proposes a simple mathematical formula for calculating the proportions of balanced justice to achieve comprehensive justice within the context of contemporary Islamic law in Indonesia.

Theoretically, this research integrates justice perspectives from both Western and Islamic philosophy, encompassing the classical theories of Plato and Aristotle which emphasize harmony and proportionality; John Rawls' theory of social justice which highlights principles of equality and distributive justice; and the thought of Al-Farabi and Al-Ghazali, who view justice as a balance between individual morality and social welfare (*maslahah*). These three dimensions of justice are operationalized within a layered theoretical framework: the Grand Theory consists of the rechtsstaat theory, which encompasses the theories of authority and legal protection; the Middle Range Theory includes the theory of rights and obligations; and the Applied Theory comprises the theories of justice, utility, and legal certainty.

The research employs a normative legal method with statutory, philosophical, and case approaches, focusing on concrete decisions of the Religious Courts. Data analysis emphasizes how judges interpret and apply positive legal norms in the context of substantive justice through ijtihad and responsive methods of legal reasoning.

The findings indicate that, in practice, the integration of the three aspects of justice often requires flexible legal interpretation and may even open space for contra legem decisions when positive norms are deemed not to reflect substantive justice. Judges function as both moral agents and social engineers, tasked with balancing legal certainty with the social and moral justice of the community. The study concludes that the effort to harmonize moral, legal, and social justice constitutes the essence of judicial ijtihad in realizing a comprehensive and contextually grounded Islamic legal justice in Indonesia.

الملخص

رشيد رزاني، رقم القيد: ٢٣٠٣١١٠٢٠٠٢٧، *تكامل جوانب العدالة في أحكام الأموال المشتركة والمواريث بالمحكمة الشرعية*، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج محمد حنفية، الماجستير، والمشرف الثاني: الأستاذة الدكتورة الحاجة وحيدة، الماجستير، أطروحة الدكتوراه، كلية الدراسات العليا بجامعة أنطاساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، ٢٠٢٦م.

الكلمات المفتاحية: العدالة الأخلاقية؛ العدالة القانونية؛ العدالة الاجتماعية؛ الأموال المشتركة بين الزوجين؛ الميراث في الفقه الإسلامي؛ اجتهاد القاضي؛ القانون التقدّمي؛ القانون أداةً لإعادة هندسة المجتمع؛ محكمة الشرعية في إندونيسيا.

تحلل هذه الدراسة تكامل مفاهيم العدالة الأخلاقية والقانونية والاجتماعية في الأحكام القضائية المتعلقة بالأموال المشتركة والمواريث في محاكم الشرعية الإندونيسية. ويكمن التركيز الرئيسي للبحث في معضلة القضاة عند التوفيق بين اليقين القانوني المعياري ومطالب العدالة الموضوعية المتنامية في المجتمع. تبرز هذه الإشكالية عندما يعتبر تطبيق القواعد الجامدة — مثل تقسيم الأموال المشتركة بالمناصفة أو تقييد حقوق الإرث لغير المسلمين — غير ملبٍ لمعايير العدالة الأخلاقية والاجتماعية في حالات عينية معينة. وبناءً عليه، تؤكد هذه الدراسة على أهمية الاجتهادات القانونية، مثل تطوير منح الوصية الواجبة عبر الأحكام القضائية. تقدم الدراسة أيضا معادلة رياضية بسيطة حول كيفية حساب حصص العدالة المتوازنة كجهد لتحقيق العدالة الشاملة في سياق الشريعة الإسلامية المعاصرة في إندونيسيا.

ومن الناحية النظرية، تدمج هذه الدراسة رؤى العدالة من منظور الفلسفة الغربية والإسلامية، بما يشمل نظريات العدالة الكلاسيكية لأفلاطون وأرسطو التي ترتكز على التناغم والتناسب، ونظرية العدالة الاجتماعية لجون رولز التي تؤكد على مبادئ المساواة والعدالة التوزيعية، بالإضافة إلى فكر الفارابي والغزالي الذي يرى العدالة توازناً بين الأخلاق الفردية والمصلحة الاجتماعية. تطبق أبعاد العدالة الثلاثة هذه في إطار نظرية متعددة الطبقات: النظرية الكبرى (Grand Theory) تتمثل في نظرية دولة القانون التي تشمل نظريتي السلطة والحماية القانونية، والنظرية المتوسطة (Middle Range Theory) تشمل نظرية الحقوق والواجبات، والنظرية التطبيقية (Applied Theory) تتكون من نظريات العدالة والمنفعة واليقين القانوني.

ويعتمد البحث المنهج القانوني المعياري مع توظيف مناهج التشريع والفلسفة والدراسة القضائية (القضايا العملية لقرارات محاكم الشرعية)، مع التركيز في تحليل البيانات على كيفية تفسير القضاة للنصوص القانونية الوضعية وتطبيقها في سياق العدالة الموضوعية من خلال الاجتهاد وأساليب الاستنباط القضائي ذات الطابع الاستجابي لواقع المجتمع.

وتُظهر نتائج البحث أنّ التكامل العملي بين الأبعاد الثلاثة للعدالة كثيراً ما يستلزم مرونة في تفسير النصوص القانونية، بل قد يفتح مجالاً لصدور أحكام على خلاف منطوق النص (*contra legem*) متى رُئي أنّ القاعدة الوضعية لا تجسّد العدالة الموضوعية. ويضطلع القاضي بدور الفاعل الأخلاقي (*moral agent*) ومهندس المجتمع (*social engineer*) في آنٍ واحد، من خلال السعي إلى تحقيق التوازن بين اليقين القانوني ومتطلبات العدالة الأخلاقية والاجتماعية في الوسط المجتمعي. ويخلص البحث إلى أنّ مسعى توفيق العدالة الأخلاقية والقانونية والاجتماعية يشكّل جوهر الاجتهاد القضائي في تحقيق عدالة إسلامية شاملة وسياقية في الواقع الإندونيسي.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **iii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iv**
PERSETUJUAN DISERTASI ..... **v**
PENGESAHAN DISERTASI ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 16
D. Siginifikansi Penelitian 16
E. Definisi Istilah 18
F. Penelitian Terdahulu 23
G. Kerangka Teori 25
1. Grand Theory (Teori Makro) 26
a. Negara Hukum 26
b. Teori Kewenangan (*Authority of Theory*) 32
b. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) 36
2. Middle Range Theory (Teori Meso) 39
Teori Hak dan Kewajiban 39
3. Applied Theory (Teori Mikro) 48
a. Teori Keadilan 49
b. Teori Kemanfaatan 63
c. Teori Kepastian Hukum 67

H. Metode Penelitian 76

I. Sistematikan Penulisan 85

BAB II KEWENANGAN PERADILAN AGAMA, KONSEP KEADILAN, LOGIKA HUKUM, DAN MAKNA INTEGRASI 87

A. Peradilan Agama dan Kewenangannya dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama dan Kewarisan 87

1. Peradilan Agama dan Kewenangannya 87

2. Hukum Harta Bersama 89

a. Harta Benda Dalam Perkawinan 89

b. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan 90

1). Dalam Hukum Islam 90

2). Dalam Hukum Adat 92

2). Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 93

3. Hukum Waris 100

a. Sumber Hukum Waris 100

1) Sumber Hukum Materiil 100

2) Sumber Hukum Formil 116

b. Asas Hukum Waris 123

4. Teknik Pemeriksaan Sengketa Harta Bersama dan Kewarisan di Persidangan 132

a. Acara Pemeriksaan Sengketa Harta Bersama 132

b. Acara Pemeriksaan Sengketa Waris 133

c. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Perkara Harta Bersama dan Kewarisan 142

d. Acara Penyelesaian Kumulasi Perkara Waris 143

B. Konsep Keadilan Moral (*Moral Justice*), Keadilan Hukum (*Legal Justice*), dan Keadilan Sosial (*Social* Justice) dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Kewarisan 145

1. Keadilan Moral (*Moral Justice*) 145

2. Keadilan Hukum (*Legal Justice*) 147

3. Keadilan Sosial (*Social Justice*) 150

C. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim 152
1. Aspek Aksiologi Untuk Mewujudkan Putusan Legalistik dan Argumentatif 152
2. Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) 158
3. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) 165
4. Teori Putusan Hakim yang Ideal 171
D. Makna Integrasi dan Hubungan dengan Hukum 177
1. Definisi Integrasi 177
2. Hubungan Integrasi dengan Hukum 177

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG HARTA BERSAMA DAN KEWARISAN 187
A. Putusan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama 187
1. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Blk 187
2. Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Pra 190
3. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk 195
4. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.JS 203
5. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Bjb 211
6. Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Plg 218
7. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kp 225
8. Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs., jo. 9/2024/Pdt.G/PTA.Sby 228
9. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.Bjb. jo. 38/Pdt.G/2018/PTA.Bjm. 233
B. Putusan Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama 245
1. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Mtr 245
2. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Pdg 251
3. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Yk 261
4. Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda 275
5. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Bjb 287

BAB IV ANALISA TERHADAP INTEGRASI ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HARTA BERSAMA DAN KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA 312

A. Integrasi aspek keadilan dalam putusan pengadilan agama terkait pembagian waris dan harta bersama ditinjau dari perspektif Keadilan Hukum, Keadilan Moral dan Keadilan Sosial 312

Putusan Harta Bersama

1. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Blk 312

2. Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Pra 315

3. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk..... 319

4. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.JS 324

5. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Bjb 328

6. Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Plg..... 335

7. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kp 339

8. Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. jo. 9/2024/Pdt.G/PTA.Sby 343

9. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.Bjb. jo. 38/Pdt.G/2018/PTA.Bjm. 348

Putusan Kewarisan

1. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Mtr 353

2. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Pdg 356

3. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Yk 360

4. Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda jo 376/Pdt.G/2024/PTA.Sby..... 364

5. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Bjb 367

B. Pendekatan mazhab hukum progresif dalam penemuan hukum dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dalam putusan waris dan harta Bersama di pengadilan agama..... 371

C. Konstruksi model integrasi keadilan yang dapat dirumuskan dari praktik putusan tersebut, sehingga dapat menjadi rujukan teoritik dan praktis bagi penemuan hukum di lingkungan Peradilan Agama . 376

Tabel Matriks Hasil Temuan 391

BAB V PENUTUP..... 398

A. Kesimpulan 398

B. Rekomendasi 399

DAFTAR PUSTAKA..... 401

RIWAYAT HIDUP 410

DAFTAR TABEL

Tabel hak–kewajiban suami istri dalam Islam, fikih, dan hukum positif 46

Kerangka Teori..... 76

Metode penalaran hukum yang dikenal dengan metode IRAC 168

Matriks Hasil Temuan..... 391